



# 39 Kelurahan Terima Dana Hibah

## Wali Kota Yogyakarta Minta Fokus Pemberdayaan Masyarakat

**YOGYA. TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan dana hibah LPMK yang bersumber APBD senilai Rp5,5 miliar untuk 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, Kamis (2/5). Diantara 45 kelurahan, baru 39 kelurahan yang secara resmi menerima dana tersebut, karena mekanisme Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, bahwa dana hibah tersebut untuk pemberdayaan masyarakat. Dana tiap kelurahan besarnya berbeda.

Hal tersebut bergantung pada proposal yang masuk berdasarkan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). "Harapan saya, pencairannya sesuai yang direncanakan. Jangan begitu dapat uang lalu lupa. Ini agar diterapkan sesuai tujuan," tandasnya, sesuai kegiatan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Kota Yogyakarta 2019 di Lapangan Segara Amarta RW 13 Bangorejo, Kricak, Tegallrejo, Kamis (2/5).

Ia menjelaskan, bahwa dana yang masuk ke wilayah terdiri beberapa jenis. Mulai dana hibah

**PENYALURAN DANA HIBAH**

- Pemkot Yogyakarta memberikan dana hibah LPMK yang bersumber APBD senilai Rp5,5 miliar untuk 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, Kamis (2/5).
- Baru 39 kelurahan yang secara resmi menerima dana tersebut, karena mekanisme Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, bahwa dana hibah tersebut untuk pemberdayaan masyarakat.

● ke halaman 15

### 39 Kelurahan

● Sambungan Hal 9

bah, daya kelurahan, serta ada pelimpahan kewenangan.

"Sebenarnya satu kelurahan itu bisa mendapatkan dana Rp1,7 miliar. Itu harapannya, pemanfaatannya agar sesuai perencanaan yang sudah ada. Misal fokus untuk kemiskinan, ada juga lansia, PAUD, dan warga miskin. Jadi jangan hanya fisik, tapi juga SDM. Kemiskinan ini bisa ditanggulangi dengan kegiatan ekonomi produktif," tandasnya.

Terkait dana hibah tersebut, lanjutnya, kelurahan yang paling sedikit mendapatkan Rp89 juta dan paling tinggi Rp147 juta. Pemberdayaan ditekankan Haryadi, sangatlah penting. Ibarat sebuah komponen, pemberdayaan adalah *software* dan pembangunan fisik adalah *hardware*.

"Jadi jangan sampai yang tampak bagus hanya luarnya, namun dalamnya juga perlu," bebernya.

Sementara Ketua LPMK Prawirodirjan, Ajar Permono mengatakan, bahwa total dana yang diterima pihaknya sama tahun lalu, yakni sebesar Rp132,5 juta. Dana tersebut akan dikelola sesuai masukan masyarakat.

"Dari dana tersebut 75 persen digunakan untuk fisik dan sisanya nonfisik," ujarnya.

Kegiatan fisik yang dimaksud, lanjutnya, misalkan pembangunan saluran air limbah serta sumur resapan. Sementara untuk kegiatan pemberdayaan yakni pelatihan keterampilan membuat kue, sosialisasi pencegahan narkoba, dan sebagainya.

**Kelurahan Harus Aktif**

Sebelumnya, terkait penggunaan dana kelurahan, Lurah Kotabaru, Supardi menjelaskan, bahwa pada April ini terdapat dua kegiatan yang menggunakan dana kelurahan. Mulai *workshop* bimbingan teknis perencanaan pembangunan wilayah pada 15 April lalu.

"Biaya untuk dua kegiatan pada April lalu, sebesar Rp19 juta. Sebenarnya ada 3 kegiatan, tapi kami terkendala waktu karena dana kelurahan turun pertengahan bulan sementara SPJ (Surat Pertanggungjawaban) harus diselesaikan akhir bulan," ungkapnya kepada *Tribun Jogja*.

Supardi mengatakan, total dana kelurahan yang diterima Kelurahan Kotabaru sebesar Rp352 juta. Namun uang tersebut seluruhnya berada di Pemkot Yogyakarta, tepatnya di Badan Perencanaan Keuangan Aset Daerah (BPRAD) Kota Yogyakarta.

"Jadi pencairan dana kelurahan ini, kelurahan yang harus aktif. Setelah meny-

erahkan SPJ, maka dana kelurahan bisa dicairkan. Jadi, sistemnya kami 'maling' dulu. Tapi sejauh ini, tak ada kendala," ungkapnya.

Secara keseluruhan, dana kelurahan di Kotabaru aman digunakan sesuai peruntukan, yakni pemberdayaan masyarakat serta pembangunan fisik. Ia mengatakan, untuk pembangunan fisik, yang paling mendesak adalah pembangunan jalan inspeksi di RT 1 dan RW 1 Kotabaru yang merupakan daerah kantong kemiskinan.

"Pembangunan ini sangat penting. Disamping sebagai jalur evakuasi, harapan kami kalau jalan sudah terbantu bisa untuk sirkulasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian, karena di sana banyak KS/PS yang ada di bantaran Sungai Code. Selain berfungsi sebagai jalan, nantinya juga sebagai lorong sayur," tandasnya. (kur)

Lo. Trihastono, S.Soc. MM

**HIBAH** - Wali Kota Yogyakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bulog, Kamis (2/5).



## 45 RPK Segera Dibentuk

**KEPALA** Divisi Regional Bulog DIY, Rini Andri-da menjelaskan, bahwa saat ini sudah ada 1.900 Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh DIY. Jumlah itu belum termasuk 45 RPK yang baru diluncurkan pada Kamis (2/5) kemarin.

"Kami berharap, adanya pembukaan RPK ini kami bisa memberi kontribusi untuk mendekatkan pangan ke masyarakat," ujarnya saat Penanaman BBGRM Kota Yogyakarta 2019 di Lapangan Segara Amarta RW 13 Bangunrejo, Kricak, Tegalrejo, Kamis (2/5). Ia mengatakan, pada kesempatan ini pihaknya menjalin kerjasama dengan Pemkot

Yogyakarta terkait penyediaan stok, keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok, dan stabilitas harga.

"Ketiga tujuan tersebut dituangkan dalam kerjasama ini. Sinergi ini menjadi awal untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, agar mendapatkan pangan lebih dekat lagi dengan harga yang disarankan, yaitu mengacu pada HET (Harga Eceran Tertinggi)," ungkapnya.

● ke halaman 15

### 45 RPK

● Sambungan Hal 9

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP-MPPA) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menambahkan, terdapat 45 RPK tersebar di masing-masing kelurahan di Kota Yogyakarta. RPK tersebut dikelola Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dibina tim PKK. "Modal untuk membuka RPK Rp2 juta. Kita ada dana untuk pemberdayaan ekono-

mi. Nanti keuntungan dari RPK, bisa diputar UP2K," bebernya.

Sedang Bulog, lanjutnya, sebagai penyuplai siap memenuhi kebutuhan pokok di RPK meliputi lima komoditas, yakni beras medium sampai premium, terigu, minyak, gula pasir, dan daging kerbau.

"Terkait penyimpanan ini, bila perputaran pesanan mencapai Rp1 juta, maka Bulog yang mendistribusikan langsung ke RPK. Jadi UP2K bisa sistem *preorder*," jelas Edy. (kur)



**HARGA STANDAR** - Masyarakat semakin mudah mendapatkan kebutuhan pokok melalui RPK.

Tidak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan Kemantren Tegalrejo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Kricak			
3. Dinas PMPPA			

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005